

KOTA SEMARANG

TANGGUH DALAM PENANGANAN BENCANA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJ IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016 merupakan dokumen laporan pencapaian kinerja sebagai pelaksanaan penetapan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016 sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan prestasi kerja.

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara keseluruhan adalah **97,67** atau telah mencapai **kinerja sangat baik**.

Dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan 8 kegiatan memiliki kinerja **100** dan sebagian besar kinerjanya antara **80-99**.

Semarang, 31 Desember 2016

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG**

Drs. IWAN BUDISETIAWAN

Pembina Utama Muda (IVc)

NIP. 19590902 198802 1 003

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
 - (1) Tugas Pokok dan Fungsi
 - (2) Struktur Organisasi
- C. Permasalahan Utama

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
 - (1) Visi dan Misi
 - (2) Faktor Penentu keberhasilan
 - (3) Tujuan dan Sasaran
 - (4) Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
 - (1) Indikator Kinerja
 - (2) Dasar Pembobotan
 - (3) Skala Penilaian
- B. Analisis Pencapaian Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan
- D. Pencapaian Kinerja
- E. Strategi Pemecahan Masalah

BAB IV PENUTUP

- A. Tinjauan Umum
- B. Tinjauan Khusus
- C. Saran Tindak Lanjut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang ada beberapa aspek pendukung lainnya yang meliputi (a) Aspek keuangan ; (b) Aspek SDM; (c) Aspek sarana dan prasarana, dan (d) Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Tap MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 , yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKJ IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016 diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi. Disamping itu penyusunan LKJ IP dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi,misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang pada akhir tahun anggaran atau pada saat penyusunan laporan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kota Semarang, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha penanggulangan bencana;
2. Pelaksanaan kegiatan operasional pertolongan pertama akibat bencana termasuk pula pelaksanaan pelayanan penyelamatan masyarakat;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan teknik dan operasional terhadap unit — unit Penanggulangan bencana, instansi pemerintah swasta dan masyarakat di bidang usaha pencegahan penanggulangan bencana;
4. Pelaksanaan peningkatan keterampilan tenaga sukarelawan dan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait didalam penanggulangan bencana;
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

2) Struktur Organisasi

Susunan organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - ✓ Sub Bagian Perencanaan dan Evakuasi;
 - ✓ Sub Bagian Keuangan; dan
 - ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - ✓ Seksi Pencegahan; dan
 - ✓ Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - ✓ Seksi Kedaruratan; dan
 - ✓ Seksi Logistik.
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - ✓ Seksi Rehabilitasi; dan Seksi Rekonstruksi.

6. Jabatan Fungsional

7. Unsur Pengarahan

C. PERMASALAHAN UTAMA

Dengan memperhatikan permasalahan bencana saat ini dan isue yang berkembang nampaknya diperlukan suatu paradigma baru dalam kelembagaan atau unit Tim Reaksi Cepat PB (TRC). Salah satu realisasi dari nafas paradigma baru adalah perubahan orientasi visi dan misi. Sebagai masukan dalam menentukan visi adalah adanya kenyataan bahwa TRC mencakup aspek pencegahan, penanggulangan dan pembinaan / penyuluhan kepada masyarakat. Sasarannya adalah emergency dan resque serta rehabilitasi.

Realisasi lainnya adalah peningkatan peran TRC dan peningkatan institusinya sehingga perlu dibuat unit pengurangan bencana menuju masyarakat Kota Semarang yang tangguh bencana mungkin diwujudkan melalui Kelurahan Siaga Bencana (KSB) serta membentuk Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) dimana seluruh elemen masyarakat, badan usaha serta instansi pemerintahan yang terkait dengan kebencanaan dapat saling sinergi dalam mewujudkan Kota Semarang yang tangguh akan bencana.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1) Visi Dan Misi

Visi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah

" Terciptanya Masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana, "

Misi :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasif;
2. Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

2) Faktor Penentu Keberhasilan

Dalam rangka perumusan Tujuan dan Sasaran yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi , perlu dievaluasi terlebih dahulu factor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian Visi dan Misi. Faktor penentu keberhasilan merupakan hal-hal yang perlu dijadikan prioritas atau perhatian agar pencapaian Visi dan Misi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun faktor kunci keberhasilan dari pencapaian Visi dan Misi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang diantaranya adalah :

- a. Adanya potensi sumberdaya di Kota Semarang yang masih dapat diberdayakan dan dimanfaatkan secara optimal;
- b. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pimpinan pada Pemerintah Kota Semarang;
- c. Aktifitas - aktifitas masyarakat di Kota Semarang yang dapat memperlancar terselenggaranya pelayanan penanggulangan bencana.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada issue dan analisis strategis. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi.

Sasarannya adalah menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan / aset Pemerintah Kota Semarang baik sebelum (pra), sedang berlangsung maupun pasca pembangunan. Dalam suasana iklim politik yang secara nasional cenderung menghangat namun kondisi keamanan dan kewaspadaan perlu kita tingkatkan, walaupun kejadian kasus bencana ada yang bias dan tidak dapat diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, pembinaan teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bencana.

4) Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan

Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan - kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan penanganan bencana, sehingga aset / angka kerugian dapat ditekan sekecil mungkin dan aset yang dapat terselamatkan dapat meningkat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja atas Kebijakan, Program, maupun Kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja diuraikan melalui formulir PK seperti terlampir pada Lampiran.

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang digunakan dalam Pengukuran Kinerja meliputi :

- ✓ Indikator Input
 - ✓ Indikator Output
 - ✓ Indikator Outcome
- Indikator Input menunjukkan sumberdaya dan dana yang digunakan dalam melakukan kegiatan, seperti Dana, SDM, atau peralatan kantor.
 - Indikator Output menunjukkan keluaran yang langsung dihasilkan dari kegiatan.
 - Indikator Outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya Keluaran.
 - Indikator Outcome mencerminkan sasaran atau tujuan yang dikehendaki dari setiap kegiatan yang dilakukan.

2. Dasar Pembobotan

Pembobotan dalam Evaluasi Kinerja, baik pada Evaluasi Kinerja Kegiatan (EK-1). Evaluasi Program (EK-2) dan Evaluasi Kebijakan (EK3), dilakukan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Pembobotan Indikator Input, Output dan Outcome pada penilaian kinerja kegiatan, dilakukan dengan menilai pengaruh indikator kinerja tersebut terhadap penilaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Penilaian dilakukan melalui pengumpulan pendapat dari beberapa stakeholder internal.

- b. Pembobotan masing-masing kegiatan, program maupun kebijakan didasarkan pada jumlah anggaran dana yang dibebankan kepada masing-masing kegiatan. Semakin besar alokasi dana terhadap suatu kegiatan/program/kebijakan, maka bobotnya semakin besar sesuai jumlah alokasinya.

3. Skala Penilaian

Dari Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai skala penilaian sebagaimana tersebut dalam Renstra Kota Semarang tahun 2010 - 2016 seperti dibawah ini :

- | | | |
|----|---------------|-------------------|
| 1. | 85 s/d 100 | Sangat Baik |
| 2. | $70 < X < 85$ | Baik |
| 3. | $55 < X < 70$ | Cukup baik |
| 4. | Kurang 55 | Kurang baik/gagal |

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya

menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja, oleh karenanya termasuk hasil analisis dan evaluasi terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan, dan lain-lain.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja ini paling tidak mencoba merangkum dan mencari kesesuaian antar perencanaan strategis dengan kinerjanya (vertikal), maupun manfaat dari kebijakan, program, maupun kinerja bagi pihak-pihak yang menerima manfaat, dari jasa yang diterimanya (horinsontal).

Dalam tataran operasional maka akuntabilitas kinerja berkaitan dengan implementasi strategi dan pengawasannya. Evaluasi tataran operasional ini secara mendetail dilakukan pada evaluasi kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal penting yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan analisis secara komprehensif dalam tataran operasional ini paling tidak akan mampu melihat keterkaitan antara kinerja dengan perencanaan strategisnya.

Oleh karena itu, dari kesimpulan hasil evaluasi perlu suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan rinci.

Disamping itu, perlu pula dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain mencakup analisis masukan keluaran (*inputs-outputs*), analisis realisasi hasil (*outcomes*) dan manfaat (*benefits*), analisis dampak (*impacts*) baik positif maupun negatif, analisis keuangan dan analisis kebijakan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Tahun anggaran 2016, aspek dukungan dana yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, khususnya anggaran kegiatan beserta realisasinya adalah sebagaimana terlampir.

D. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun anggaran 2016 sebagaimana terlampir dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

pada tahun 2016 adalah sebesar **97,67** hal ini berarti kinerja tahun anggaran 2016 adalah **sangat baik**.

E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2016 di BPBD Kota Semarang antara lain :

1. BPBD Kota Semarang merupakan badan yang baru sehingga target utama adalah penguataan organisasi dan administrasi perkantoran serta sarana prasarana perkantoran kurang maksimal dan ditambah pindah kantor baru yang semula di Gedung juang 45 pindah di Komplek Terminal Penggaron

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

LKJ IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016 yang secara umum disusun sebagai media akuntabilitas, berisikan informasi-informasi bagi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam Tahun anggaran 2016.

Dari Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Kinerja terhadap Kegiatan, Program dan Kebijakan serta pembobotan seperti yang diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016 dikategorikan *Sangat Baik*.

B. TINJAUAN KHUSUS

Di BPBD Kota Semarang sudah disiapkan personil sejumlah 28 orang dari rescue BPBD dan 19 dari relawan yang semuanya merupakan tenaga lapangan untuk (**SAR**) yang sewaktu-waktu dibutuhkan dilapangan apabila terjadi bencana di wilayah kota Semarang selama 24 jam.

C. SARAN TINDAK LANJUT

1. Pada tahun berikutnya sangat diperlukan bantuan langsung dari BPBD Kota Semarang berupa paket material dan paket tenaga kerja untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana serta mengantisipasi dampak kerugian akibat bencana.
2. Pada tahun berikutnya, bantuan masyarakat yang terkena bencana dan atau korban bencana yang bersifat **kedaruratan** perlu ditingkatkan jumlah dan jenis bantuan **sembako** .

Semarang, 31 Desember 2016
**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG**

Drs. IWAN BUDISETIAWAN
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19590902 198802 1 003